



PERAN BELANJA PEMERINTAH DAN *HUMAN CAPITAL* TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Shofwatun Hasna

STIE Insan Pembangunan, Bitung Curug Tangerang, Email: shofa_elgo@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama

8 September 2016

Dinyatakan Dapat Dimuat
18 November 2016

KEYWORDS:

*Aggregate Output,
Unemployment Rate,
Poorness Rate,
Government spending.*

ABSTRAK

This study aims to analyze the performance of government spending and human capital for unemployment and poorness since six years (2010-2015). The panel model chosen is random effect. The analysis result shows that (1) The unemployment in the district is lower than in the city, and commodity of food has highest influence for the poorness; (2) The growth of government spending has positive impact to aggregate output, even it doesn't optimal yet. The case is the allocation for governments spending is low, and the highest allocation is for sipil employment budgets; (3) Using simultant regression, Government spending and Human Development Index (HDI) have no impact to unemployment; but by using partial regression, government spending has positive impact and HDI has negative impact to unemployment; (4) Using simultant regression, goverment spending has positive impact and HDI has negative impact to poorness. But by using partial regression, both of them have no impact to poorness.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran belanja pemerintah dan *Human Capital* terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia periode tahun 2010-2015. Teknik estimasi yang digunakan adalah analisis data panel dengan *fixed effect*. Hasil analisis menunjukkan bahwa; (1) Tingkat pengangguran di pedesaan selalu lebih rendah daripada di perkotaan, dan komoditi yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan adalah makanan; (2) Belanja pemerintah berdampak positif terhadap output agregat, meskipun dampaknya belum cukup optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh masih minimnya bagian belanja pemerintah yang disalurkan kepada belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan sebagian besar belanja pemerintah masih dialokasikan untuk belanja pegawai; (3) *Government spending* dan IPM secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Namun, secara parsial belanja pemerintah dan IPM secara langsung berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran dan dampak IPM terbukti cukup besar dibanding dengan *government spending*; (4) Belanja pemerintah secara simultan berdampak positif dan IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara partial, keduanya tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan..

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pengangguran merupakan hal penting untuk diperhatikan mengingat semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, pengangguran dan juga kemiskinan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan sangatlah serius, hal tersebut dapat dilihat dari segi banyaknya program yang dijalankan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah. Todaro (2006), mengatakan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya adalah tingkat pendapatan rata-rata daerah. Semakin tinggi

tingkat pendapatannya, maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun, alokasi anggaran pembangunan harus tepat sasaran, kalau tidak akan menambah kemiskinan menjadi lebih parah. Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Indonesia selain dihadapkan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi, juga dihadapkan pada masalah lain yang cukup serius, yaitu masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari Indek Pembangunan Manusia (IPM),

atau dikenal dengan Human Development Index (HDI), yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas SDM yang rendah ini berarti menunjukkan produktivitas yang rendah, dimana ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan yang sedang disorot, mengingat akan segera diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuat arus tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia (BPS, 2015). Antisipasi dari dampak negatif penerapan MEA adalah tenaga kerja Indonesia harus memiliki standar yang tinggi dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri. Rendahnya kualitas ketenagakerjaan di Indonesia dapat digambarkan dari rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing. Daya saing rendah ini dapat tercermin oleh kurangnya kesempatan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja masuk ke dalam pasar, sehingga keterampilan angkatan kerja tidak dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pengangguran yang cukup besar.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan yaitu (Ferdinan, 2015): (1) menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5-6 persen, (2) menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan diantaranya: (i) Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, (ii) Kualitas angkatan kerja yang rendah, (iii) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda yang tinggi, (iv) TPT terdidik (di atas SLTA) masih tinggi.

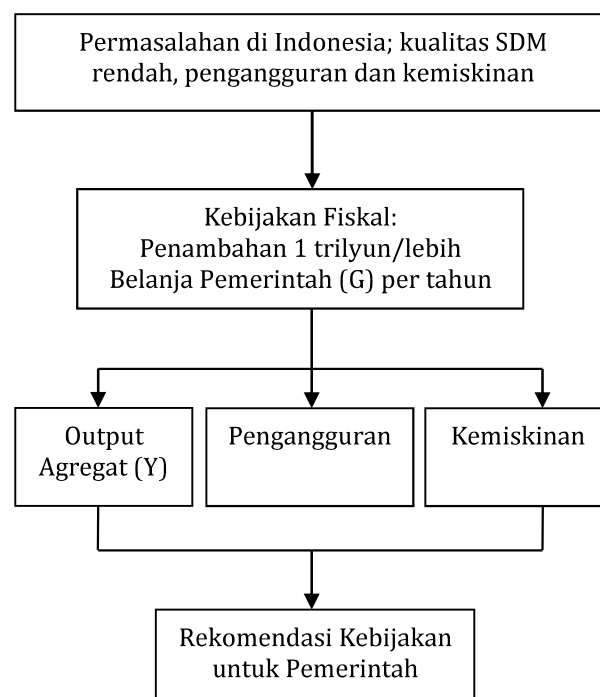
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mustamin (2015) di Sulawesi Selatan, yang menghasilkan penelitian bahwa belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita. Penelitian yang sejenis lainnya juga dilakukan oleh Widodo (2011) di Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan hasil penelitian Misdawati di Indonesia (2013), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi, karena

tidak tepat sasaran kepada pengguna subsidi di lapangan.

Penelitian ini berjalan atas dasar yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia, namun sedikit berbeda. Peneliti ingin menganalisis peran belanja pemerintah dan *human capital* terhadap output agregat, pengangguran, serta kemiskinan di Indonesia. Penelitian dilakukan di 18 provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, dimana 18 provinsi tersebut setiap tahunnya selalu menambah anggaran belanja sekitar satu triliun/lebih selama periode 2010-2015. Penelitian ini berusaha menganalisis peran belanja pemerintah dan *human capital* pada periode tersebut.

Permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal demi stabilisasi ekonomi, yaitu dengan kebijakan menambah pengeluaran pemerintah/*government spending* (G). *Government spending* ini diharapkan mampu berperan banyak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembentukan output agregat, yang akhirnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Gambaran tentang alur pemikiran penulis untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, dapat digambarkan dalam diagram kerangka berpikir dibawah ini,

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Berpikir



Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi,

1. pengangguran dan kemiskinan di Indonesia periode 2010-2015

2. peran belanja pemerintah dan *Human Capital* terhadap pembentukan output agregat di Indonesia periode 2010-2015
3. peran belanja pemerintah dan *Human Capital* terhadap pengangguran di Indonesia periode 2010-2015
4. peran belanja pemerintah dan *Human Capital* terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2010-2015.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Output Agregat

Output barang dan jasa suatu perekonomian/Gross Domestic Bruto (GDP) bergantung pada; (1) jumlah input yang disebut faktor-faktor produksi; (2) kemampuan untuk mengubah input menjadi output yang dapat ditunjukkan dalam fungsi produksi $Y = f(K, L)$. Dua faktor produksi yang penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat alat/sarana yang digunakan para pekerja. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja. Faktor produksi dan fungsi produksi sama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan yang disebut juga dengan output perekonomian, (Mankiw, 2006: 46-47).

2.2. Pengangguran

Pengangguran dapat terjadi karena antara lain terdapat angkatan kerja yang lebih besar dari kesempatan kerja dan juga disebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Bentuk-bentuk pengangguran yang disebabkan masalah friksional dikenal dengan pengangguran non sukarela. Dilain sisi pengangguran juga disebabkan adanya pengangguran sukarela, terutama saat pasar tenaga kerja sudah mencapai equilibrium atau tidak adanya kendala untuk masuk dan keluar di pasar tenaga kerja tersebut. Pengangguran dapat berdampak negative terhadap kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Sehingga secara agregat pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional riil yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya), akibatnya kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah, (Kementerian Keuangan, 2014).

2.3. Kemiskinan

Friedman dalam Mustamin (2015), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas

hanya pada: (1) modal produktif atau aset; tetapi juga pada (2) net work atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; (3) pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Kemiskinan menurut Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product (GNP) per capita*, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk *survive*. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Pendapat Jhingan (2000) menyatakan bahwa negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, umumnya terjat ke dalam apa yang disebut lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Nurske (dalam Widodo, 2011) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah sebab sekaligus akibat. Lingkaran kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain berinteraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi tetap berada dalam keadaan terbelakang.

2.4. Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net ekspor (ekspor dikurangi impor). Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar. Intervensi pemerintah yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya

dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/kebijakan pemerintah, (Kementerian Keuangan, 2014).

Kegiatan pemerintah berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan umum bagi masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijaksanaan perekonomian dengan negara lainnya, (Mankiw, 2006). Belanja Pemerintah menurut BPS (2013) terdiri dari, (1) Belanja Tidak Langsung, (2) Belanja Langsung.

2.4.1 Belanja tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian anggaran belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

2.4.1.1 *Belanja Pegawai Tidak Langsung* adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya.

2.4.1.2 *Belanja Bunga*, yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.4.1.3 *Belanja Subsidi*, yaitu belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut tentunya menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.4.1.4 *Belanja Hibah* adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

2.4.1.5 *Belanja Bantuan Sosial* adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam

penggunaannya. Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

2.4.1.6 *Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* yaitu belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi, (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, (4) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, (5) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

2.4.1.7 *Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari: (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi, (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, (4) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, (5) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

2.4.1.8 *Belanja Tidak Terduga* adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah bagian anggaran belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (BPS, 2013) meliputi,

2.4.2.1 *Belanja Pegawai Langsung* adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.4.2.2 *Belanja Barang dan Jasa* adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.4.2.3 *Belanja Modal* adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

2.5. Indek Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan laporan tahunan berupa Human Development Report (HDR). Dalam HDR tersebut dikeluarkan laporan tahunan mengenai indek pembangunan manusia/Human Development Index (HDI) di tiap negara. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah Nobel berkebangsaan India yaitu Amartya Sen, dan seorang ekonom dari Pakistan, Mahbub Ul Haq, yang dibantu

oleh Gustav Ranis dari Yale University, dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economic*. Sen menyatakan bahwa HDI adalah sebuah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar (*vulgar measure*) karena masih banyak keterbatasan. Namun, HDI menerapkan ukuran pada aspek-aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekedar pendapatan per kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI juga merupakan salah satu bahan kajian atau topik pembahasan bagi para peneliti untuk meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah negara secara luas dan beragam. *Human Development Report* 2007 (dalam Widodo, 2011) dijelaskan bahwa *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*. HDI melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: (1) Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*); (2) Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan; (3) Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan, (Widodo, 2011). Sjafrizal (2012:167) menjelaskan bahwa, jika upaya pembangunan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan upaya pembangunan fisik wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja daerah cenderung lebih lambat. Kondisi tersebut

dapat pula menimbulkan rasa kurang puas dalam masyarakat yang dapat membawa implikasi politik.

2.6. Kebijakan Fiskal

Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Mankiw, 2006).

Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrument utama, (1) kebijakan pajak, (2) pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2003), tapi kebijakan apapun itu dapat secara langsung mempengaruhi komponen-komponen permintaan secara menyeluruh jatuh pada kebijakan ini. Menurut Sudiyono (1985) variabel instrument kebijakan fiskal dapat berbentuk pajak, transfer pemerintah, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal atau penganggaran memiliki tiga fungsi, (1) fungsi alokasi, (2) fungsi distribusi, (3) fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi bersediaan dengan barang-barang dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang-barang social, dan kombinasi dari barang-barang social yang telah dipilih. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilisasi atau mempertahankan rendahnya tinggi pengangguran, harga atau tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Keynes menjelaskan bahwa selama masa depresi ekonomi, kebijakan moneter tidak efektif. Permintaan agregat meningkat dengan cepat hanya dengan kebijakan fiskal (Romer, 2001). Sebuah kebijakan fiskal yang diambil harus efektif dan memiliki dampak negatif yang kecil. Sejarah menunjukkan negara-negara berkembang mengandalkan perluasan kebijakan fiskal untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi.

2.7. Dampak Belanja Pemerintah terhadap Output Agregat, Pengangguran dan Kemiskinan

The General Theory yang ditulis oleh Keynes, disebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak yang membelanjakan pendapatannya, semakin

banyak barang dan jasa yang dapat dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan diproduksi dan semakin banyak pekerja yang dikaryakan (Mankiw, 2006: 274). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penambahan belanja pemerintah berdampak pada peningkatan output secara agregat.

Sedangkan belanja pemerintah berdampak negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonom Keynesian, yaitu mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu Negara, dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* ini akan semakin besar jika diasumsikan bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, (Kementerian Keuangan, 2014).

Model makro ekonomi Keynes, kas permintaan merupakan bagian yang sangat penting untuk mengontrol permintaan agregat. Jika ekonomi berada dibawah tingkat *full employment*, permintaan agregat bisa ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau dengan mengurangi tingkat pajak. Keynes berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mempromosikan permintaan agregat terhadap pemenuhan tingkat *full employment*. Masalah paling inti di kebijakan ekonomi adalah tingginya pengangguran dan tingkat inflasi, serta defisit neraca berjalan atau *external imbalance*. Solusi untuk masalah tersebut, pertumbuhan ekonomi tinggi sangat dibutuhkan, tetapi perluasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi memiliki kelemahan terkait ketidakseimbangan antara tingginya pertumbuhan permintaan dan kapasitas persediaan dalam ekonomi. Ini berdampak pada neraca eksternal yang merupakan sebuah peningkatan impor dan penurunan ekspor, sehingga menghasilkan inflasi tinggi. Akibat dari situasi ini, ekonomi dapat kehilangan daya saingnya dan memperburuk *eksternal imbalance*. Hal tersebut dapat meningkatkan *employment level*, tetapi bermasalah dalam hal memperburuk neraca berjalan dan neraca pembayaran (BOP). Kebijakan fiskal pada masa inflasi biasanya adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak (Mankiw, 2006).

Sedangkan dampak belanja pemerintah terhadap kemiskinan Wibowo (2003) berpendapat bahwa esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas dalam hal ini berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk dapat mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, akan mempunyai aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap

berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah maupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: (1) Akses untuk mendapatkan makanan yang layak; (2) Akses untuk mendapatkan sandang yang layak; (3) Akses untuk mendapatkan rumah yang layak; (4) Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan baik dan layak; (5) Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan; (6) Akses kepada leisure dan entertainment; (6) Akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan terpenuhinya semua basic need dan supporting needs. Permasalahan aksesibilitas ini menjadi penting karena kemiskinan akan menjadi lingkaran setan karenanya, di mana golongan miskin tidak akan terangkat atau terlepas dari kemiskinan ketika mereka tidak dapat meningkatkan intelektualitas dan sumber daya mereka. Namun karena adanya masalah aksesibilitas tersebut, peningkatan ini akan menjadi suatu yang tidak mungkin dilakukan. Pada akhirnya, sebagai akumulasi dari beban fisik dan psikologis akan menimbulkan berbagai akses negatif seperti keresahan sosial.

Mahmudi (2007) berpendapat, dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam hal ini, pembangunan manusia di-proxy dengan IPM atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Di mana IPM merupakan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak disentuh oleh pasar karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah sebagai peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi.

Menurut Center for the Study of Living Standards tahun 2001 (dalam Widodo, 2011) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan

anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi. Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

Tinjauan literatur tersebut digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis peran belanja pemerintah terhadap pembentukan output agregat, dan perannya dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Data tersebut didapat dari beberapa sumber sebagai berikut: (1) Data Tingkat Pengangguran Terbuka dari publikasi data Badan Pusat Statistik Indonesia, (2) Data Jumlah Penduduk Miskin dari publikasi data Badan Pusat Statistik Indonesia, (3) Data Pengeluaran Pemerintah diperoleh dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, dan (4) Data Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

Data sekunder yang digunakan adalah data panel, yaitu penggabungan dari data *cross section* sebanyak 18 provinsi di Indonesia dan data *time series* dari tahun 2010-2015. Pengolahan atas data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dilakukan menggunakan beberapa paket program statistik. Kegiatan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel menyangkut pembuatan tabel dan analisis. Sementara itu pada pengolahan regresi data panel, penulis menggunakan paket program *Eviews 6.0*.

3.1. Panel Data Analysis

Penggunaan model panel pada dasarnya memiliki beberapa keunggulan. Pertama, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan

sebagai *study of dynamic adjustment*. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, variatif, bebas, sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Keenam, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agresi data individu. Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel. (Ajiya, 2011:52). Ariefanto (2012: 150) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pemodelan data panel yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemodelan ini berdasarkan asumsi apakah karakter residual bersifat konstan atau random.

3.1.1 Fixed Effect Model

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^k \alpha_j X_{j,it} + u_{it} \quad \dots\dots\dots(1.1)$$

Dimana

$$u_{it} = e + \sum_{i=1}^N D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^T w_t \quad \dots\dots\dots(1.2)$$

dimana D_i^c dan D_t^T adalah variabel *dummy* sebanyak N-1 dan T-1 untuk mengidentifikasi residual spesifik cross section dan urutan waktu yang bersifat konstan. Dengan memasukkan (2.2) ke (2.1) maka diperoleh

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^k \alpha_j X_{j,it} + \sum_{i=1}^{N-1} D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^T w_t + e \quad \dots\dots\dots(1.3)$$

3.1.2 Random Effect Model

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + a_i + u_{it} \quad \dots\dots\dots(2.1)$$

Model random effect dalam Ariefanto (2012:151-152), digunakan ketika *unobserved effect* α_i dapat diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu/lebih variabel bebas. Model (3.1) dapat dimodelkan dengan menggunakan composite error term,

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + v_{it} \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

karena α_i selalu ada pada *composite error term* pada setiap periode waktu, maka v_{it} mengalami *serial correlation*, dapat ditunjukkan bahwa:

$$\text{Corr}(v_{it}, v_{is}) = \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_u^2}; t \neq s \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

Kemudian mengoreksi keberadaan *serial correlation* dengan prosedur GLS. Namun demikian agar prosedur ini efektif data harus memiliki N yang lebih besar daripada T. Dengan GLS dilakukan transformasi pada

setiap regressor dan variabel terikat melalui suatu koefisien λ , dimana

$$\lambda = 1 - \left(\frac{\sigma_u^2}{\sigma_\alpha^2 + T\sigma_u^2} \right)^{1/2} \dots\dots\dots(2.4)$$

Estimator ini selanjutnya digunakan untuk mentransformasi persamaan 2.1 menjadi

$$y_{it} - \hat{\lambda} y_i = \beta_0 (1 - \hat{\lambda}) + \beta_1 (x_{it1} - \hat{\lambda} x_{i1}) + \dots + \beta_k (x_{itk} - \hat{\lambda} x_{ik}) + (v_{it} - \hat{\lambda} \bar{v}_i) \quad \dots\dots\dots(2.5)$$

3.2. Pemilihan Model Terbaik

Juanda (2012:183) menjelaskan bahwa pemilihan model antara *pooled* atau panel adalah dengan Uji Chow atau Likelihood Test Ratio, yaitu dengan melihat signifikansi dari F hitung. Uji Chow melihat konsistensi pendugaan dengan *fixed effect* untuk memilih antara *fixed effect* atau *pooled*. Hipotesis nol yang digunakan adalah intersep, dan slope adalah sama. Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/n - 1}{(RSS_2)/(nT - n - K)} \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

Jumlah individu adalah n, T merupakan jumlah periode waktu, K adalah banyaknya parameter dalam model FEM, serta RSS berturut-turut adalah *residual sum of square* untuk model *pooled* dan model FEM. Nilai F akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat bebas sebesar n-1 untuk numerator dan sebesar nT-K untuk denominator. Hipotesisnya adalah,
 H_0 : *Probability value* > α (*pooled* lebih baik)
 H_1 : *Probability value* < α (*fixed effect* lebih baik).

Sedangkan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik dari *random effect* digunakan uji Hausman. Kriteria Wald nilai statistik *Hausman* ini akan mengikuti distribusi *chi-square* sebagai berikut:

$$W = x^2[K] = [\hat{\beta}, \hat{\beta}GLS] \sum^{-1} [\hat{\beta}, \hat{\beta}GLS] \quad \dots\dots\dots(4.1)$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak jumlah peubah bebas (p). Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*. Hal ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model FEM. Hipotesis dalam hasil pengolahan *Eviews 6.0* bisa dilihat dari,
 H_0 : *Probability value* > α (*random effect, individual effect uncorrelated*)
 H_1 : *Probability value* < α (*fixed effect*)

3.3. Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa peneliti ingin mengetahui peran penambahan belanja

pemerintah terhadap output agregat, pengangguran dan kemiskinan, maka peneliti hanya mengambil 18 provinsi dari 34 provinsi yang ada, dimana provinsi tersebut setiap tahunnya meningkatkan belanjanya sekitar satu trilyun atau lebih setiap tahun selama 2010-2015. Penelitian ini mengangkat faktor belanja pemerintah (G) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah penduduk miskin, output agregat (Y), dan Indek Pembangunan Manusia. Ada tiga model yang dibangun dalam penelitian ini. Model pertama ingin mengetahui tentang dampak belanja pemerintah terhadap output agregat. Model Kedua bertujuan untuk mengetahui dampak belanja pemerintah terhadap pengangguran, dan ketiga terhadap kemiskinan. Rancangan ketiga model yang dibangun dalam penelitian ini adalah,

$$\begin{aligned}\log_{-}Y_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \log_{-}G_{it} + \beta_2 \log_{-}IPM_{it} + \varepsilon_{it} \\ \log_{-}TPT_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \log_{-}G_{it} + \beta_2 \log_{-}IPM_{it} + \varepsilon_{it} \\ \log_{-}JPM_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \log_{-}G_{it} + \beta_2 \log_{-}IPM_{it} + \varepsilon_{it}\end{aligned}$$

dimana,

- G : belanja pemerintah berupa data nominal dalam trilyun rupiah menurut jenis pengeluaran
IPM : Indeks Pembangunan Manusia yang mewakili *Human Capital*
Y : PDRB yang mewakili variabel output agregat daerah dalam juta rupiah atas dasar harga konstan 2000
TPT : persentase Tingkat Pengangguran Terbuka yang mewakili variabel pengangguran
JPM : Jumlah Penduduk Miskin yang mewakili variabel kemiskinan

4. HASIL ANALISIS

4.1. Hasil Uji Chow

Langkah pertama dalam pemilihan model terbaik adalah dengan Uji Chow yaitu melihat konsistensi pendugaan dengan *fixed effect* untuk memilih antara *fixed effect* atau *pooled*. Hasil uji *Chow* menunjukkan bahwa penggunaan model *fixed effect* untuk ketiga model lebih tepat, karena *probability value* dari F statistik signifikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model panel *fixed effect* lebih baik digunakan daripada *pooled*/OLS. Perhatikan tabel 1.1.

Tabel 1.1 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Model I			
Cross-section F	838.566	(17,88)	0.0000
Cross-section Chi-square	550.122	17	0.0000
Model II			
Cross-section F	33.455	(17,88)	0.0000
Cross-section Chi-square	217.075	17	0.0000
Model III			
Cross-section F	11.401	(17,88)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.706	17	0.0000

Selanjutnya, memilih model panel antara *fixed effect* atau *random effect* dengan uji Hausman.

Tabel 1.2 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Model I			
Cross-section random	151.101	2	0.0000
Model II			
Cross-section random	14.355	2	0.0008
Model III			
Cross-section random	8.776	2	0.0124

Hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa penggunaan model *fixed effect* untuk kedua model lebih tepat, karena *probability value* < $\alpha = 0,05$ (signifikan), sehingga H_0 ditolak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model panel *fixed effect* lebih baik digunakan daripada *random effect*.

4.2. Uji Hipotesa dan Signifikansi Model Panel *Random Effect*

Hasil estimasi model melalui pengolahan data dengan software *Eviews 6.0* ditampilkan dalam tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient
Model I (Variabel dependent log_Y)	
R-squared	0.99896
C	**1.709
log_G	*0.13655
log_IPM	*3.746
Model II (Variabel dependent log_TPT)	
R-squared	0.8878
C	1.3275
log_G	-0.2084
log_IPM	-0.1872
Model III (variabel dependent log_JPM)	
R-squared	0.831
C	*48.828
log_G	*1.633
log_IPM	*-26.29
Variable	Coefficient
Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha = 0.05$ (**) signifikan pada $\alpha = 0.1$	

Hasil estimasi *fixed effect* model I menunjukkan bahwa variabel G dan IPM secara simultan berdampak positif pada variabel Y. Hasil estimasi *fixed effect* model II menunjukkan bahwa variabel eksogen G dan IPM tidak signifikan mempengaruhi variabel TPT. Sedangkan hasil estimasi *fixed effect* model III menunjukkan bahwa variabel eksogen G berdampak positif pada variabel JPM dan IPM berdampak negatif terhadap JPM. Ketiga model yang dibangun sama-sama memiliki R^2 yang memadai, yang berarti bahwa model I mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 99%,

sedangkan 1% dijelaskan oleh variabel diluar model. Model II mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 88%, sedangkan 12% dijelaskan oleh variabel diluar model. Model III mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 83%, sedangkan 17% dijelaskan oleh variabel diluar model. Hasil regresi pada model II semua variabel tidak signifikan secara simultan maka, penulis melakukan regresi secara parsial yang menghasilkan estimasi sebagai berikut,

Tabel 1.4 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect secara Parsial*

Variable	Coefficient
Variabel dependent log_Y	
<u>dependent G</u>	
R-squared	99.86
C	*4.8
log_G	*0.4
<u>dependent IPM</u>	
R-squared	0.9988
C	*-5.3
log_IPM	*5.8
Variabel dependent log_TPT	
<u>Independent G</u>	
R-squared	0.8878
C	*1.000114
log_G	*-0.2197
<u>Independent IPM</u>	
R-squared	0.886
C	*0.801
log_IPM	*-3.329
Variabel dependent log_JPM	
<u>Independent G</u>	
R-squared	0.82
C	2.84
log_G	0.0426
<u>Independent IPM</u>	
R-squared	0.82
C	*5.95
log_IPM	-1.68

Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha = 0.05$

Hasil estimasi *fixed effect* model I G dan IPM secara partial berdampak positif terhadap Y. Model II menunjukkan bahwa variabel eksogen G dan IPM secara parsial berdampak negatif terhadap variabel TPT. Model III menunjukkan bahwa G berdampak positif dan IPM berdampak negatif terhadap JPM. Sehingga, setelah melihat semua hasil estimasi, maka model dapat ditulis sebagai berikut;

Model yang diolah secara simultan adalah,
 $\log_{Y_{it}} = -1.709 + 0.14 \log_{G_{it}} + 3.7 \log_{IPM_{it}}$
 $\log_{JPM_{it}} = 48.83 + 1.633 \log_{G_{it}} - 26.29 \log_{IPM_{it}}$

Model yang diolah secara partial adalah,
 $\log_{Y_{it}} = 4.8 + 0.4 \log_{G_{it}}$
 $\log_{Y_t} = -5.3 + 5.8 \log_{IPM_{it}}$

$$\log_{TPT_{it}} = 1.000114 - 0.2197 \log_{G_{it}}$$

$$\log_{TPT_{it}} = 0.801 - 3.329 \log_{IPM_{it}}$$

5. PEMBAHASAN

5.1. Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Periode 2010-2015

5.1.1 Pengangguran

Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan yaitu 7,48 persen menjadi 6,13 persen. Pada tahun 2013 angka TPT nasional mengalami peningkatan menjadi 6,17 persen. Namun, TPT nasional tahun 2014 kembali menurun menjadi 5,81 persen pada Februari 2015. Gambar grafik 1.3 menunjukkan fluktuasi TPT di Indonesia periode 2010-2015.

Gambar 1.3 Grafik TPT di Indonesia



Data BPS, diolah.

Sementara itu, jika TPT dilihat dari perkotaan dan pedesaan, TPT perkotaan 2011-2015 mengalami penurunan, yaitu dari 9,38 menjadi 7,02. Ketersediaan lapangan pekerjaan di perkotaan cukup beragam, sedangkan di pedesaan sangat terbatas. Namun, TPT di pedesaan selalu lebih rendah daripada di perkotaan. Penyerapan tenaga kerja tertinggi di pedesaan adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Pada tahun 2014, lapangan usaha tersebut menjadi pangsa terbesar yaitu mencapai 34 persen pekerja. Menurut Todaro, perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan sebab munculnya pengangguran di kota. Pada tahun 2010 tercatat bahwa angka urbanisasi di Indonesia masih cukup tinggi sebesar 49,8 persen. (BPS, 2015: 165).

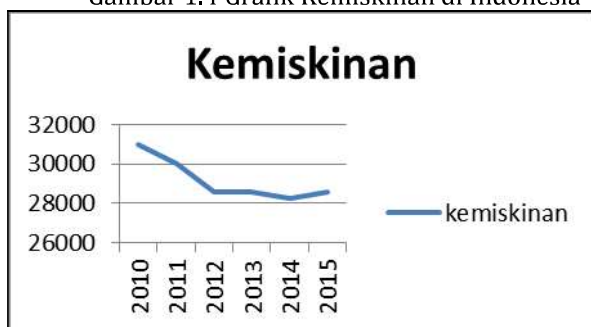
5.1.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dari tahun 1978 sampai 2008 lebih banyak di desa dibanding di kota, meskipun secara relatif jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia dengan mempergunakan data Susenas tahun 1976,

terdapat lebih dari 70% orang miskin berlokasi di Jawa. Akan tetapi, ditahun 1976 distribusi regional kemiskinan mengalami perubahan secara dramatis, hanya 46% di pedesaan luar Jawa. Pasca krisis 1998, ada penurunan proporsi penduduk miskin yang berlokasi di daerah perkotaan atau pedesaan di Jawa, yang diikuti dengan kenaikan kemiskinan di pedesaan luar Jawa. Akibat krisis 1997-1998, jumlah penduduk miskin diperkirakan menjadi 49,5 juta orang atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia terkena dampak yang sangat besar. Kondisi pada tahun 1997, kemiskinan di Indonesia menyentuh angka yang sangat tinggi sebesar 40,3% atau meningkat sebesar 22,6% dari tahun 1996, kemudian menurun menjadi 17,7% di tahun 2006, dan 15,4% tahun 2008, (Kuncoro, 2010:143-145).

Persentase penduduk miskin tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen), kemudian meningkat pada bulan Maret 2015 hingga mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Kenaikan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibanding perkotaan. Grafik tingkat kemiskinan selama periode penelitian ditunjukkan oleh gambar 1.4 berikut ini,

Gambar 1.4 Grafik Kemiskinan di Indonesia



Data BPS, diolah.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan adalah beras, rokok filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu dan kopi.

Ketidaktahanan pangan juga terkait dengan guncangan (shock) seperti kekeringan, bencana, atau fluktuasi pasar internasional. Banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami ketidaktahanan pangan dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya, jika seseorang tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengkonsumsi 2.100 kalori perhari. Ketidaktahanan pangan di Indonesia, bukan disebabkan oleh kurangnya persediaan beras, tetapi kemampuan orang untuk membeli beras, dimana kebutuhan beras masih bisa dicukupi dan sisanya impor. Selama periode 1988-2002, telah diimpor rata-rata 10% untuk kebutuhan nasional. Besarnya impor beberapa produk pangan, seperti daging, susu, jagung, kedelai, gula, bahkan

garam, menimbulkan ketidaktahanan pangan yang memiliki dampak luas, (Kuncoro, 2010:303).

Sedangkan untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, bensin, listrik pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sepanjang periode 2014-2015 indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, keduanya mengalami peningkatan, (BPS, 2015).

5.2. Peran Belanja Pemerintah dan *Human Capital* terhadap Pembentukan Output

Pertumbuhan PDB tertinggi menurut *Government spending* dan *Human Capital* diharapkan mampu berperan banyak dalam pembentukan output agregat yang akhirnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Pada periode penelitian, pertumbuhan PDB tertinggi menurut lapangan usaha adalah pada kategori informasi dan komunikasi. Sekolah, perkantoran, dan industri membutuhkan ketersediaan sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi seperti PC, computer, akses wifi, dan sebagainya. Peringkat kedua dan ketiga adalah jasa perusahaan dan jasa lainnya. Jasa perusahaan tahun 2014 mengalami pertumbuhan 9,81 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 8,92 persen. Sementara itu, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan PDB terendah adalah pertambangan dan penggalian, pengadaan air, dan administrasi pemerintah. Pertambangan dan penggalian selama periode 2011-2014, mengalami penurunan dari 4,29 persen menjadi hanya 0,55 persen. Pertambangan dan penggalian merosot tajam karena beberapa sebab, yaitu; (1) imbas dari kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah, (2) penurunan permintaan global, (3) harga komoditas di pasar internasional, (BPS, 2015: 37).

Sedangkan kategori yang sangat berperan penting dalam pembangunan di Indonesia karena mempunyai kontribusi tinggi terhadap PDB adalah industri pengolahan. Meskipun kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan pada periode 2011-2015, namun perannya masih cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sepanjang tahun 2014 industri pengolahan tumbuh 4,63 persen dan yang semakin berkembang yaitu industri makanan dan minuman, (BPS, 2015: 39). Kontribusi dari tiap kategori dapat dilihat pada gambar 1.2 pada lampiran.

The General Theory yang ditulis oleh Keynes, disebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak yang membelanjakan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan diproduksi dan semakin banyak

pekerja yang dikaryakan. Teori ini sesuai dengan hasil estimasi bahwa peningkatan belanja pemerintah berdampak positif terhadap output agregat. Hal tersebut tergambar pada PDRB dari 18 provinsi penelitian yang rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang periode 2010-2015. Peningkatan PDRB tersebut seiring dengan peningkatan 1 triliun atau lebih belanja pemerintah setiap tahunnya, yang tergambar pada lampiran grafik 1.5.

Peningkatan yang tajam terjadi di Pulau Jawa, dimana pulau Jawa juga merupakan pulau yang meningkatkan belanja pemerintah sekitar 5 sampai 12 triliun tiap tahunnya. Selain itu Sumatera Utara juga merupakan provinsi yang menghasilkan peningkatan PDRB yang cukup tajam. Sumatera Utara mengeluarkan belanja pemerintah sekitar 3 sampai 6 triliun. Sedangkan Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur menambahkan belanja pemerintahnya sekitar 1 sampai 6 triliun. Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat berdampak positif pada peningkatan output agregat, semakin besar belanja pemerintah yang dikeluarkan akan semakin besar output yang dihasilkan oleh suatu pemerintah daerah.

Peningkatan belanja pemerintah yang berdampak positif terhadap output agregat ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk barang dan jasa serta modal cukup berhasil meningkatkan output agregat periode 2010-2015 meskipun belum optimal. Hasil estimasi menunjukkan bahwa persentase pengaruh belanja pemerintah terhadap output agregat sangatlah kecil. Dampak *government spending* terhadap output agregat secara simultan lebih kecil dibanding dengan dampak parsialnya. Hasil estimasi membuktikan bahwa pengaruh IPM terhadap output agregat jauh lebih besar daripada pengaruh *government spending*.

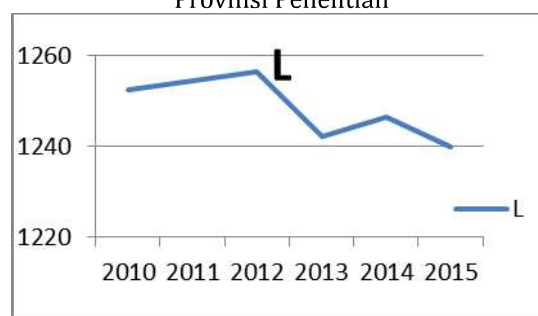
Fakta menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah yang disalurkan kepada belanja barang dan jasa serta belanja modal masih sangat minim. Beberapa provinsi masih banyak yang menyalurkan sebagian besar belanja pemerintahnya untuk belanja pegawai. Belanja pemerintah belum banyak dialokasikan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi, yaitu sebagai input untuk tujuan peningkatan output barang dan jasa, (perhatikan gambar 1.5 dalam lampiran). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, karena terbukti *Human Capital* sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan output agregat, karena jika kualitas SDM meningkat, maka produktivitas pun meningkat.

5.3. Peran Belanja Pemerintah dan *Human Capital* terhadap Pengangguran

Masalah paling inti di kebijakan ekonomi adalah tingginya pengangguran dan tingkat inflasi, Apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak.

Total Penyerapan Tenaga Kerja (TPAK) tahun 2010-2015 di 18 provinsi penelitian menunjukkan grafik yang menurun. Penurunan partisipasi angkatan kerja ini seiring dengan adanya peningkatan belanja pemerintah sekitar 1 triliun/lebih setiap tahun sepanjang periode penelitian. Grafiknya tergambar dalam grafik 1.6 berikut ini.

Grafik 1.4 Total Partisipasi Angkatan Kerja di 18 Provinsi Penelitian



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik yang menurun pada partisipasi angkatan kerja, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 18 provinsi penelitian tersebut tergolong tinggi pula. Tingginya tingkat pengangguran terlihat tajam di tahun 2013, meski pun kembali naik di tahun 2014, namun tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali di tahun 2015.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa *government spending* dan IPM secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Namun, secara parsial belanja pemerintah berdampak negatif terhadap pengangguran meski dampaknya secara angka sangat kecil, yaitu 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan belanja pemerintah secara langsung mampu menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi, meski pengaruhnya sangat kecil. Kecilnya *multiplier effect* tersebut disebabkan oleh kurangnya alokasi belanja pemerintah untuk kegiatan-kegiatan produktif.

Jika melihat hasil estimasi parsial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ternyata IPM secara langsung berdampak negatif juga terhadap tingkat pengangguran, dan dampaknya jauh lebih besar dibanding dengan *government spending*, yaitu sebesar 3%. Data BPS periode 2010-2015 menunjukkan bahwa IPM di 18 provinsi penelitian, secara

keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ketahun (perhatikan gambar 1.7 pada lampiran).

Pemerintah perlu menambah alokasi untuk belanja bantuan social dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk atau IPM, yaitu dengan cara memperluas dan pemeratakan bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena peningkatan IPM terbukti berpengaruh dalam mengurangi pengangguran. Penambahan alokasi belanja bantuan sosial perlu dilakukan karena sesuai data BPS 2010-2012, alokasi belanja ini masih sangat minim, (perhatikan gambar 1.8 dalam lampiran).

5.4. Peran Belanja Pemerintah dan *Human Capital* terhadap Kemiskinan

Esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, akan mempunyai aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah maupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat secara layak oleh masyarakat miskin yaitu makanan, sandang, rumah, akses kesehatan dan pendidikan, hiburan, serta kebutuhan dasar lainnya. Permasalahan aksesibilitas ini menjadi penting karena golongan miskin tidak akan terangkat atau terlepas dari kemiskinan ketika mereka tidak dapat meningkatkan intelektualitas dan sumber daya mereka. Namun karena adanya masalah aksesibilitas tersebut, peningkatan ini akan menjadi suatu yang tidak mungkin dilakukan yang dapat menimbulkan keresahan sosial.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan belanja pemerintah berdampak positif dan IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara partial, keduanya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini berarti, belanja pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, namun memiliki dampak secara tidak langsung. Dampak yang diakibatkan oleh G adalah dampak positif, yang artinya ketika pemerintah menambah belanjanya, yang terjadi adalah jumlah penduduk miskin pun bertambah.

Belanja pemerintah selama periode penelitian kurang dialokasikan untuk membangun manusia agar lebih produktif. Belanja terbesar di semua kabupaten/kota di Indonesia selama periode penelitian, masih pada belanja pegawai, bahkan pada tahun 2010, 50% lebih dari alokasi anggaran belanja disalurkan untuk belanja pegawai. Kurangnya alokasi anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan masih banyaknya bagian anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai inilah yang menjadikan *government spending* berdampak positif pada kemiskinan.

Sedangkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia secara tidak langsung berdampak negatif

terhadap kemiskinan. IPM di 18 provinsi penelitian selama periode penelitian, memang mengalami peningkatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah terbesar selama ini dialokasikan untuk belanja pegawai, kemudian disusul dengan belanja modal serta belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja bantuan sosial masih tergolong sangat rendah, khususnya alokasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (perhatikan gambar 1.8 dalam lampiran). Jika alokasi anggaran untuk kualitas SDM lebih ditingkatkan lagi, maka pengaruhnya akan lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Seharusnya, pemerintah memberikan perhatian lebih untuk peningkatan kualitas hidup penduduk atau IPM yang dapat didanai dari anggaran pemerintah berupa belanja bantuan sosial. Tujuan anggaran belanja bantuan sosial yaitu untuk perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial yang telah berjalan selama periode penelitian adalah sekolah gratis, Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta dana renovasi rumah bagi penduduk miskin, meski alokasinya masih sangat rendah. Pemerintah perlu menambah alokasi untuk belanja bantuan sosial ini, karena terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijabarkan kesimpulan bahwa; (1) Tingkat pengangguran di pedesaan selalu lebih rendah daripada di perkotaan. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan adalah makanan; (2) Penambahan belanja pemerintah berdampak positif terhadap output agregat, meskipun dampaknya belum cukup optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh masih minimnya bagian belanja pemerintah yang disalurkan kepada belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan sebagian besar belanja pemerintah masih dialokasikan untuk belanja pegawai; (3) Hasil estimasi menunjukkan bahwa *government spending* dan IPM secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Namun, belanja pemerintah dan IPM secara langsung berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran, dan dampak IPM terbukti lebih besar dibanding dengan *government spending*; (4) Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara tidak langsung belanja pemerintah berdampak positif dan IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara partial, keduanya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

7. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kalangan akademis tentang peran belanja pemerintah dan *Human Capital* terhadap pengangguran dan kemiskinan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya mengangkat belanja pemerintah secara

keseluruhan saja untuk membahas dampaknya terhadap output agregat, pengangguran dan kemiskinan. Padahal, belanja pemerintah dibedakan dalam dua kategori, belanja langsung dan tidak langsung, dimana keduanya masih terbagi lagi kedalam beberapa kategori. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas pembahasan dan membangun variabel belanja pemerintah menjadi beberapa kategori, sehingga diharapkan penelitian akan memberi penjelasan yang lebih konkrit terkait dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan

7.1 Saran Kebijakan

Belanja pemerintah perlu lebih dialokasikan untuk membangun manusia agar lebih produktif khususnya alokasi belanja untuk komoditi makanan, karena komoditi ini menjadi penyebab utama kemiskinan. Cara untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang bisa dengan; (1) memajukan pembangunan desa dan memperluas sistem kredit mikro. (2) memberi dana langsung yang besarnya disesuaikan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi.

Selain itu, alokasi anggaran belanja untuk produktivitas masyarakat perkotaan juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi besarnya pengangguran di perkotaan. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal, perlu diperhatikan pemerintah untuk memperhitungkan pendapatan dan tingkat produktivitas penduduk selanjutnya, sehingga diharapkan mampu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Upaya meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok wilayah, seperti pembangunan fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut, jaringan dan fasilitas telekomunikasi.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih untuk kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pembangunan infrastruktur fisik, yang dapat didanai dari anggaran pemerintah berupa belanja modal. Tujuan belanja modal ini diarahkan untuk perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur fisik lainnya. Pemerintah perlu menambah alokasi untuk belanja modal ini, karena dalam jangka pendek, infrastruktur lebih cepat mempengaruhi kinerja daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur khususnya pendidikan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat, mendorong proses inovasi dan perbaikan teknologi produksi, serta mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha. Infrastruktur pendidikan akan mempermudah pembangunan pendidikan yang akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia atau IPM daerah. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena IPM terbukti berdampak positif terhadap pembentukan output

agregat dan berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.

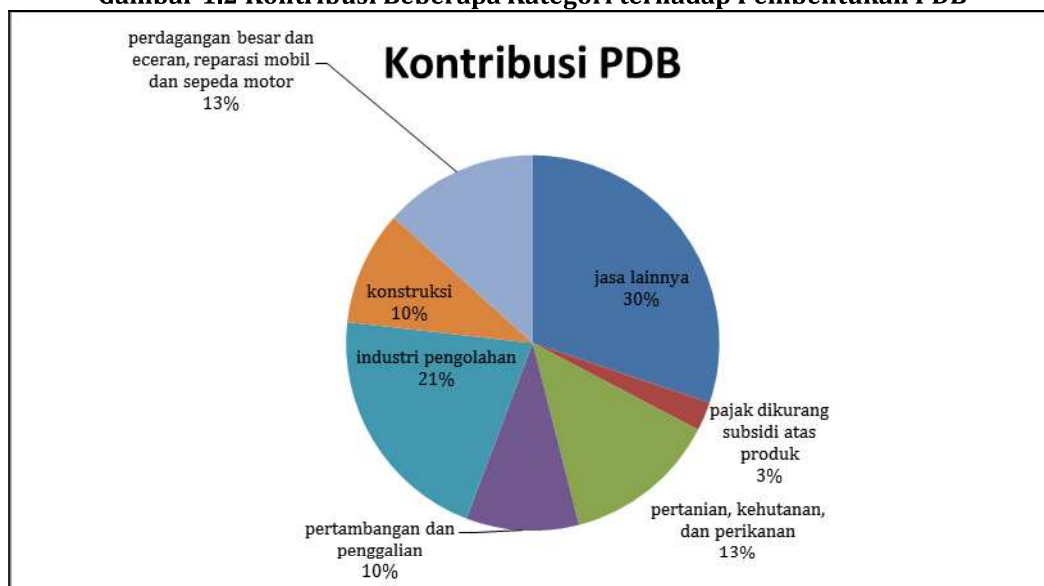
DAFTAR PUSTAKA

- Ariefanto, Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Ajija, Shochrul R. dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat, Jakarta.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- BPS. 2010. *Statistik Indonesia 2010*. BPS, Jakarta
- BPS. 2012. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2010-2013*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2015. *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2014*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2011-2015*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2015*. BPS, Jakarta.
- Ferdinan, Hery. 2011. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat*. Skripsi. IPB, Bogor.
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Dampak Belanja Pemerintah terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id pada tanggal 1 September 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N.G. 2003. *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publisher, New York.
- Mankiw, N.G. 2006. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Erlangga, Jakarta.
- Misdawati, Sari, A Arini Putri. 2013. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Volume 4 Nomor 2 hal 147-161.
- Mustamin, Siti Walida. Agussalim. Nurbayani, Sri Undai. 2015. *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Analisis, Volume 4 Nomor 2, hal 165-173.

- Wibowo, Novianto Dwi. 2003. *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Hipotesis Kuznet*. Buletin Pangsa. Edisi 10/IX.
- Romer, D. 2001. *Advanced Macroeconomics*. Second Edition. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudiyono, 1985. *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). PT Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- UNDP. 1990. *Human Development Report*. United Nations Development Programme.
- Widodo, Adi, Waridin, Maria K, Johanna. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Volume 1 Nomor 1.

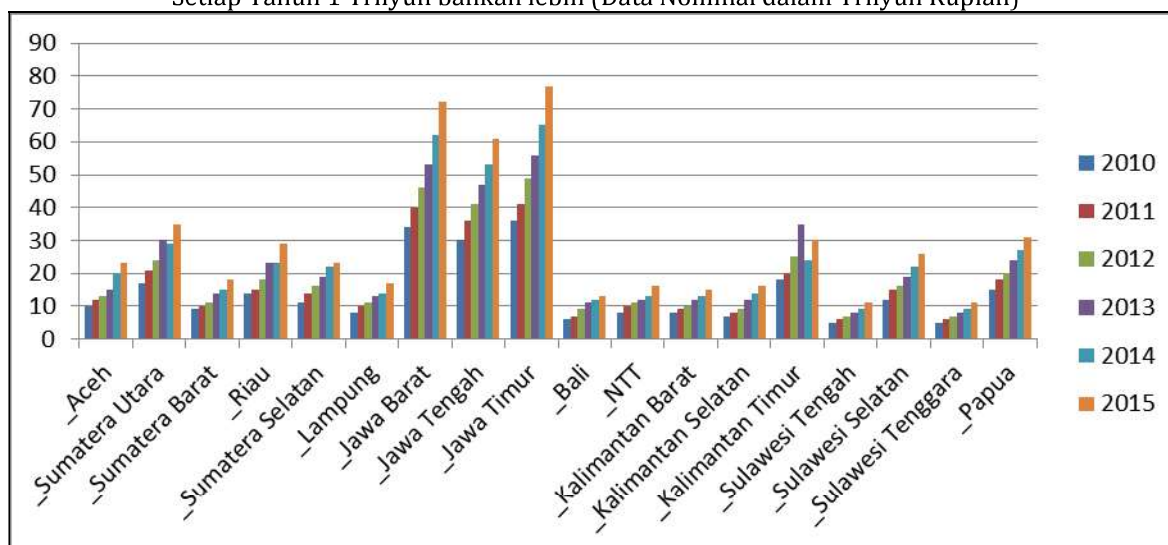
LAMPIRAN

Gambar 1.2 Kontribusi Beberapa Kategori terhadap Pembentukan PDB



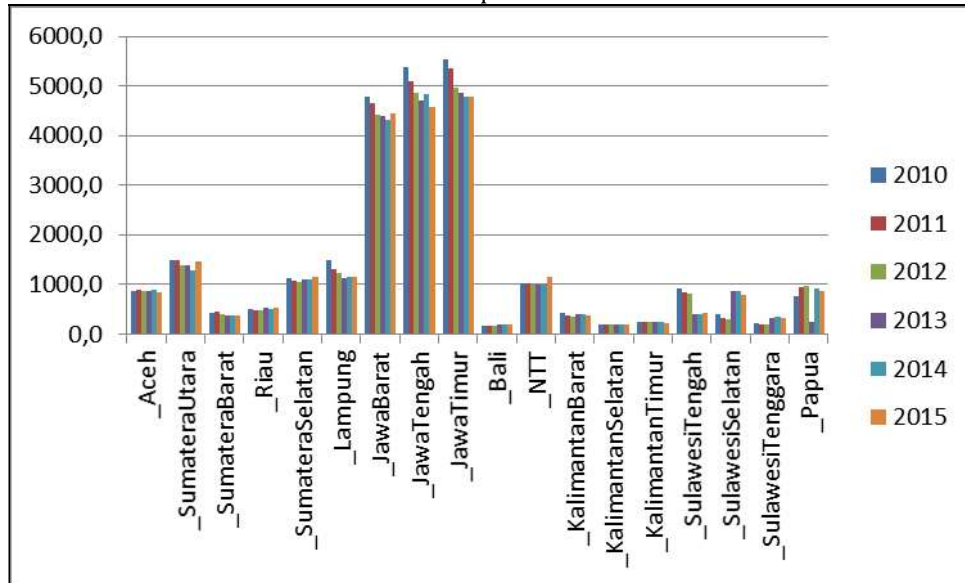
Data BPS, diolah.

Gambar 1.5 Data 18 Provinsi Penelitian yang Meningkatkan Belanja Pemerintah Setiap Tahun 1 Trilyun bahkan lebih (Data Nominal dalam Trilyun Rupiah)



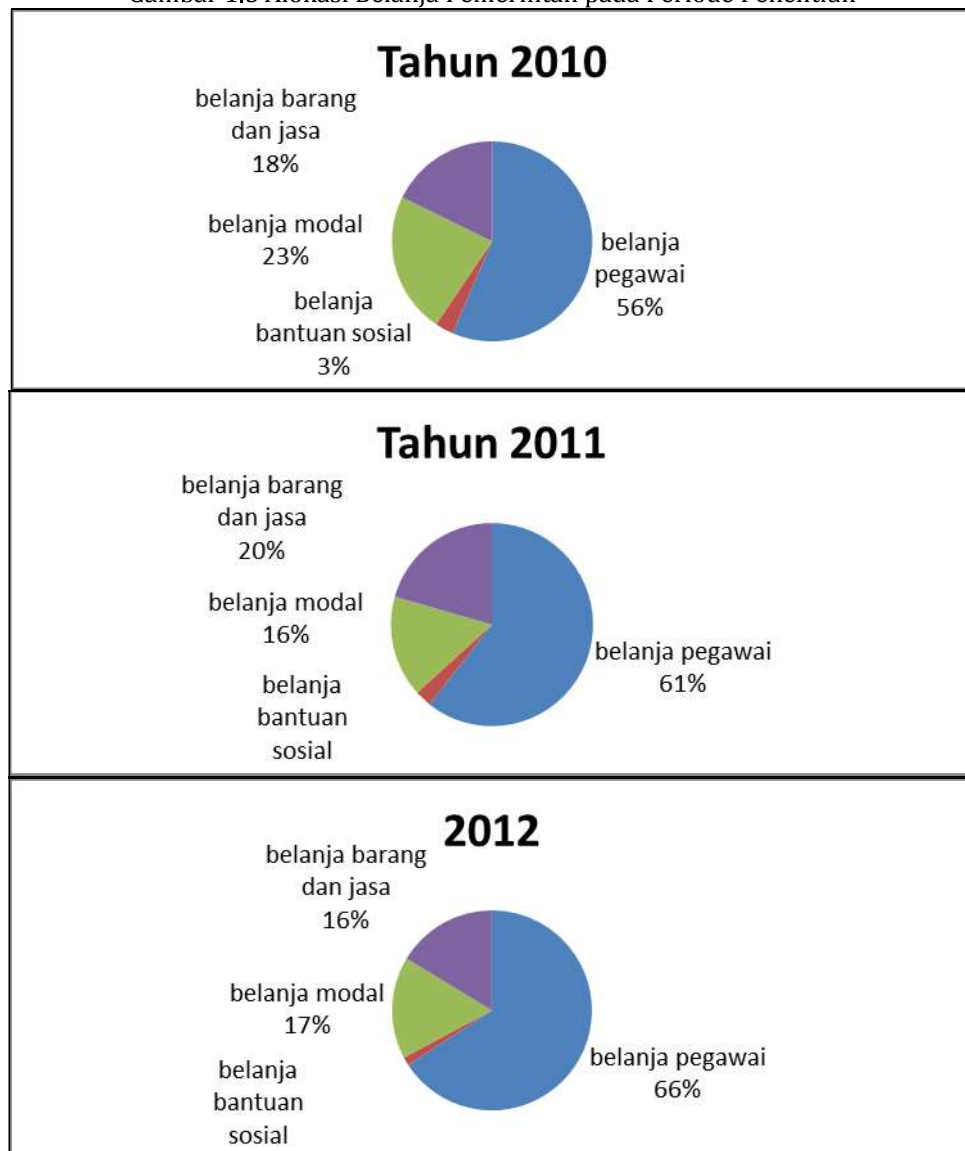
Data BPS, diolah.

Gambar 1.7 Data IPM pada Periode Penelitian



Data BPS, diolah

Gambar 1.8 Alokasi Belanja Pemerintah pada Periode Penelitian



Data BPS, diolah.